

TANGGUNG GUGAT KONSULTAN PENGAWAS DALAM KONTRAK KONSTRUKSI

MEGASARI, WIDYA VENIANY

Pembimbing : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

CONSTRUCTION CONTRACTS

KKB KK-2 TMK 118 / 11 Meg t

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Kontrak konstruksi diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 18/1999) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi diartikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana pasal 1 ayat 1 UU No. 18/1999. Perihal kontrak konstruksi sebagaimana di atas, pasal 20 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi menentukan bahwa kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. Perjanjian atau kontrak konstruksi merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktik kegiatan komersial, namun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kontrak konstruksi. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktis bisnis. Landasan hukum yang mengatur kontrak konstruksi bersumber pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana Buku III *Burgerlijk Wetboek* (B.W) tentang Perikatan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada tanggung gugat konsultan pengawas dalam kontrak konstruksi. Sasaran yang hendak dicapai adalah kontrak konstruksi layanan jasa pengawas dan tanggung gugat layanan jasa pengawas dalam kontrak konstruksi jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study*. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama kontrak konstruksi layanan jasa pengawas merupakan perwujudan dari sifat Buku III B.W., yang menganut asas kebebasan berkontrak maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat kontrak konstruksi, namun demikian batas-batas dalam peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilanggar yakni kriteria untuk dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan proyek konstruksi; kedua apabila terjadi kesalahan dalam pengawasan konstruksi yang terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka konsultan pengawas konstruksi bertanggung gugat. Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungangan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat

pengembangan sistem pertanggung jawaban bagi pelaksana konstruksi sebagaimana Pasal 26 UU No. 18/1999.

Kata kunci : Kontrak konstruksi, konsultan pengawas, tanggung gugat.

ABSTRACT

Construction contract governed by law No. 18 of 1999 on Construction Services (Law No. 18/1999) and implementing regulations of the Government Regulation Number 59 Year 2010 regarding Amendment to Government Regulation Number 29 Year 2000 Regarding Construction Services. Construction services consultancy service is defined as the planning of construction work, construction work implementation services, consultancy services and supervision of construction work as article 1 paragraph 1 of Law No. 18/1999. Subject of contract construction as above, Article 20 paragraph (1) Government Regulation Number 59 Year 2010 regarding Construction Services determines that the construction work contract basically made separately according to stages in the construction work which consists of the construction work contract for the work of planning, construction employment contract for work execution, and contract supervision of construction work for the job. Agreement or construction contract is a type of treaty that is widely used in the practice of commercial activities, but there are no provisions that specifically regulate the construction contract. This type of agreement is born and developed in a practical business. The foundation law governing construction contracts derived on the principle of freedom of contract as Book III Burgerlijk Wetboek (BW) of the engagement. The compilers of this thesis focuses on accountability in the construction contract consultant supervisor. Targets to be achieved is a construction services contract oversight and accountability services supervisor in a construction contract in the event of default. This research used a normative juridical approach to the statute approach, conceptual approach and case study. Of the existing problems can be deduced that the first construction contract oversight services is the manifestation of the nature of Book III BW, which adheres to the principle of freedom of contract meant to give freedom to the parties in making the construction contract, however, limits in the legislation that must not be violated the criteria to be able to act as a watchdog in the implementation of construction projects; second event of any errors in supervision of construction shown to cause harm to others, then the consultant construction supervisors accountable. Implementation of compensation can be done through the mechanism of enforcement coverage tailored to the level of system development for the contractor's insurance coverage as Article 26 of Law No. 18/1999.

Key words: Construction contracts, consultant oversight, accountability.